

## DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G. dan Rambabu Kodali. 2008. Benchmarking the Benchmarking Models. *“Benchmarking: An International Journal.”* Vol. 15 Issues 3 pp. 257-291. Diakses pada 5 Mei 2017. <http://dx.doi.org/10.1108/14635770810876593>
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Beasley Mark S. 2012. *Auditing and Assurance Services-An Integrated Approach*. Edisi Keduabelas. Prentice Hall.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2013. *Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Batang Tahun 2013*. Semarang: Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- , 2014. *Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- Baker, W.E. dan Sinkula, J.M. 2005. “Market Orientation and The New Product Paradox.” *The Journal of Product Innovation Management*. Vol 22 (Maret): 483-502
- Cooper, H. 2010. *Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-step Approach* Edisi keempat. Thousand Oaks, CA: Sage
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi keempat. California: SAGE Publications.
- Detty, Clotilda, S.K. 2016. “Evaluasi Peran Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai APIP”. Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 28 Maret 2017. [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=Penelitian\\_Detail&act=view&typ=html&buku\\_id=94936&objek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=94936&objek_id=4)
- Effendi, M. Arief. 2005. “Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 1, no. 1, ISSN: 0216-8642. Diakses pada 31 Maret 2017. <http://muharieffendi.wordpress.com/2007/11/08/11/peranan-komite-audit-dalam-meningkatkan-kinerja-perusahaan>
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. United Kingdom : SAGE Publications.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. Diakses pada 10 Maret 2017. <http://kbbi.web.id/kapabilitas>.
- Kantun, Sri. (2013). “Hakikat dan Prosedur Penelitian Pengembangan”. Diakses pada tanggal 3 Maret 2017. <http://library.unej.ac.id/client/search/asset/468>.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2013. “Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia”. Jakarta: Komite Standar Audit AAIP.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2014. “Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia”. Jakarta: Komite Kode Etik AAIP.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. “Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2016.” Diakses pada 28 Desember 2016. <http://www.kpk.go.id>.
- Marshall, C., & Rossman, G.B. 2011. *Designing Qualitative Research*. Edisi kelima. Thousand Oaks, CA: Sage
- Maxwell, J. A. 2005. “*Qualitative Research Design: An Interactive Approach, Applied Social Research Methods Series*”. Vol. 41: 33. Dikutip dalam Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., *Qualitative Research Methods* (United Kingdom: SAGE Publications, 2011).
- Moeller, Robert A. 2005. *Brink's Modern Internal Auditing*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyadi. 2010. *Auditing*. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyono, Sugeng. 2016. “Analisis Peningkatan Kapabilitas APIP Menggunakan IACM (Studi Pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM). Tesis Master. Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan. 6 Juli 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 28 Februari 2007.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. 30 November 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 20 Pebruari 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 22 Mei 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 22 Mei 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 30 Mei 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 31 Desember 2015.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 31 Maret 2008.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 31 Maret 2008.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER-220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 4 Juli 2008.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. 16 Juni 2009.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 1 Desember 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 12 September 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 9 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 30 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3 April 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 4 Januari 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 9 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 4 Februari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah. 28 Agustus 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 6 Juni 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. 8 Januari 2015.

Rensburg, Janse Van. 2014. *Internal Audit Capability: A Public Sector Case Study*. University of Pretoria. Diakses pada 17 Desember 2016. <http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/1703998753/abstract/E772FA80A524B83PQ/1>

Richey, R.C. and Klein, J.D. (2005). "Developmental Research Methods: Creating

Knowledge from Instructional Design and Development Practice.” *Journal of Computing in Higher Education*. 16(2).

Safitri, Nita. 2017. “Analisis Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Magelang.” Tesis Master. Universitas Gadjah Mada.

Situs Resmi BPKP. 2016. “Kondisi APIP Saat Ini dan Harapan ke Depan”. Diakses pada 30 Maret 2017. <http://www.bpkp.go.id/konten/2448/kondisi>

The Institute of Internal Auditors Research Foundation. 2009. “Internal Audit Capability Model (IA-CM) for Public Sector”. Diakses pada 20 Maret 2017. <http://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Internal%20Audit%20Capability%20Model%20IACM%20for%20the%20Public%20Sector%20Overview.pdf>.

Toding, Daniel Saleppang. 2016. “Kapasitas aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Sidoarjo (Kajian terhadap kompetensi aparat Inspektorat di kabupaten Sidoarjo).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 2, No. 1, pp 11-18 FIA UB. Diakses pada 3 Maret 2017. <http://ejournal.fia.ub.ac.id/index.php/jiap>.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18 Agustus 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. 14 Juni 1965.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 19 Mei 1999.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 5 April 2003.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 12 Agustus 2011.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 30 September 2014.

- Widyananda, Herman. 2008. “Revitalisasi Peran Auditor Pemerintah untuk Penegakan Good Governance di Indonesia.” BPK RI Nomor 3/PUB/VI/12/2008. Diakses pada 10 Maret 2017. <http://www.unpad.ac.id>
- Wijihastuti, Ratna. 2015. “Implementasi Kebijakan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis Master. Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 28 Maret 2017. [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=84577&objek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=84577&objek_id=4)
- Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. Edisi kelima. California: SAGE publications Inc.